

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ardhia Yunita Widyastuti

NPP. 30.0965

Asdaf Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ardhiaunita11 @gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** lack of community understanding in flood disaster management and emergency response, as well as the lack of community use in emergency response sub-districts. **Purpose:** This research is to find out the inhibiting and supporting factors for the implementation of flood disaster management and the efforts that have been made to overcome them. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. Selection of informants using purposive sampling and snowball sampling. **Method:** data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** Research shows that this implementation has not been optimal due to both supports and obstacles. Supporting factors in the form of the existence of a new organization and new tasks including the total number of employees and in accordance with the duties and functions, sufficient budget revenue and spending, SOPs that are running well, the availability of adequate detection tools. While the inhibiting factors are the lack of public knowledge of disaster response, lack of public understanding of the rehabilitation of buildings due to floods, lack of socialization from the BPBD to the community, not yet maximal understanding of the community in disaster response sub-district tasks, lack of facilities and infrastructure prepared, lack of understanding of the community about 3R. **Conclusion:** The implementation of the flood disaster management policy in Samarinda City, East Kalimantan Province has not gone well, therefore the BPBD needs to conduct socialization, disaster response training by the Regional Disaster Management Agency of East Kalimantan Province, develop disaster response sub-districts, and maximize the tasks of disaster response sub-districts in the implementation of the evacuation of residents affected by the flood disaster is more optimal.

**Keywords:** implementation, flood, disaster management

## ABSTRAK

**Pernmasalahan/Latar Belakang (GAP):** kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan tanggap darurat, serta minimnya masyarakat dalam pemanfaatan kelurahan tanggap darurat. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi penanggulangan bencana banjir tersebut serta upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Metode:** analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi ini disebabkan oleh yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung berupa Adanya organisasi baru dan tugas baru mencakup jumlah keseluruhan pegawai dan sesuai dengan tupoksi, pendapatan dan belanja anggaran yang cukup, SOP yang berjalan dengan baik, tersedianya alat pendeteksi yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat merupakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tanggap bencana, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi bangunan akibat bencana banjir, kurangnya sosialisasi dari pihak BPBD kepada masyarakat, belum maksimalnya pemahaman masyarakat dalam tugas kelurahan tanggap bencana kurangnya sarana dan prasana yang disiapkan, kurang pemahaman masyarakat tentang 3R. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan dengan baik maka dari itu pihak BPBD perlu mengadakan sosialisasi, pelatihan tanggap bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengembangkan kelurahan tanggap bencana, dan memaksimalkan tugas kelurahan tanggap bencana dalam pelaksanaan evakuasi warga yang terdampak bencana banjir lebih optimal.

**Kata Kunci:** implementasi, banjir, penanggulangan bencana

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Letak geografis Indonesia ialah letak negara Indonesia yang ditetapkan sebagai batas-batas yang mengelilingi Indonesia. Letak geografis Indonesia juga sangat berpengaruh dengan iklim di Indonesia salah satunya merupakan musim penghujan. Musim penghujan di Indonesia tergolong tinggi, rata – rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 – 3.000 mm per tahun. Terlalu tingginya curah hujan di Indonesia akan mengakibatkan banjir, longsor, erosi, tanah kurang subur. Iklim Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dapat menyebabkan kenaikan presentase kejadian banjir yang terjadi di Indonesia.

Frekuensi terjadinya banjir menepati urutan pertama terbanyak di Indonesia yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Iklim Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dapat menyebabkan kenaikan presentase kejadian banjir yang terjadi di Indonesia. Padatnya pemukiman juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, tidak teraturnya tata kota dan pemukiman masyarakat yang berhimpit akan mengurangi ruang untuk saluran air yang sudah ada.

Di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi dengan intensitas hujan yang tergolong tinggi. Kota Samarinda merupakan wilayah dengan peringkat pertama yang dilanda banjir jika dibandingkan dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Banjir menimbulkan masalah kesehatan seperti kurangnya air bersih pada saat terjadinya banjir, timbulnya nyamuk demam berdarah, menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, selain itu banjir juga menimbulkan kerusakan bangunan dan memakan biaya perbaikan yang tinggi. Kerugian disektor bangunan berupa rumah yang tergenang, rusak berat atau hilang hanyut, terbawa aliran banjir dengan, kondisi rusak ringan. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terkhusus Kota Samarinda agar lebih berfokus dalam mengatasi masalah banjir yang ada di Kota Samarinda.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Samarinda akan tergenang, apabila curah hujan cukup tinggi maka ancaman bencana banjir dengan ketinggian genangan banjir berkisar 30 – 100 cm Bnpb (2022). CNN Indonesia (2021) mengatakan bahwa Kota Samarinda tergenang banjir dengan retan waktu sekitar empat sampai lima hari kemudian bisa mengurangi genangan hingga surut. Banjir juga menimbulkan masalah kesehatan seperti kurangnya air bersih pada saat terjadinya banjir, timbulnya nyamuk demam berdarah, menimbulkan

masalah kesehatan bagi masyarakat, selain itu banjir juga menimbulkan kerusakan bangunan dan memakan biaya perbaikan yang tinggi. Data yang didapatkan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir di Kota Samarinda. Kerugian disektor bangunan berupa rumah yang tergenang, rusak berat atau hilang hanyut, terbawa aliran banjir dengan, kondisi rusak ringan. Nilai kerugian yang diderita warga setiap bangunan yang hilang 10 (sepuluh) juta per bangunan sudah termasuk dengan harta benda yang ada, bangunan hilang yang dimaksud merupakan pemukiman yang ada di daerah bantaran sungai atau bersifat nonpermanen. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang belum optimal dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda. Mengakibatkan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat tidak terlaksana dengan optimal. Upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu melaksanakan perbaikan dan pembangunan kembali di daerah sungai atau revitalisasi. Hal ini dilakukan karena sungai yang berada di Kota Samarinda sudah dinilai rusak sehingga debit air yang tinggi akan meluap ke daratan. Dalam usaha penanggualangan bencana di Kota Samarinda perlu diawali dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir yang dapat menimbulkan banyak kerugian yang berkepanjangan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan objek penelitian, terdapat 5 (lima) penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penanggulangan banjir (Angrelia et al., 2020; Muhammad & Aziz, 2020; Suharto & Setiawan, 2022; Wurin & Wardhono, 2022; Zikri, 2022). Selain memiliki kesamaan dalam objek penelitian namun terdapat perbedaan dalam aspek fokus penelitian yaitu efektivitas implementasi (Angrelia et al., 2020; Muhammad & Aziz, 2020; Suharto & Setiawan, 2022; Wurin & Wardhono, 2022); evaluasi program (Zikri, 2022).

Selain objek dan fokus penelitian, terkait tujuan penelitian dalam penelitian sebelumnya sebagai berikut mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam penanggulangan bencana (Angrelia et al., 2020); mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir (Muhammad & Aziz, 2020); menganalisis efektivitas implementasi penanganan bencana banjir (Wurin & Wardhono, 2022); mengetahui hasil evaluasi peran pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana banjir (Zikri, 2022); menganalisis efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir (Suharto & Setiawan, 2022). Dilihat dari metode yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode yang sama dengan peneliti

lakukan kali ini yaitu metode deskriptif kualitatif (Angrelia et al., 2020; Muhammad & Aziz, 2020; Suharto & Setiawan, 2022; Wurin & Wardhono, 2022; Zikri, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut menjadi dasar dalam penelitian yang dilakukan kali ini dengan adanya perbedaan dan persamaan yang memberikan hasil berbeda untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

#### **1.4 Pernyataan kebaruan ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dikarenakan konteks penelitian yang dilakukan yaitu penanggulangan bencana banjir untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir, metode yang digunakan merupakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif juga berbeda dengan penelitian Wurin, Aziz, Zikri, dan Suharto. Indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Thomas R Dye (2017) dengan dimensi organisasi pelaksana, anggaran pelaksana, peraturan pelaksana, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan masalah yang sudah di rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap 12 informan yaitu Kepala BPBD, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Staf Bidang Jaringan Sumber Air PUPR, Camat Sungai Pinang, Lurah Mugirejo dan Masyarakat. Adapun analisis menggunakan teori implementasi dari Thomas R. Dye yang digunakan untuk implementasi kebijakan dengan lima dimensi yakni Organisasi Pelaksana, Anggaran Pelaksana, Peraturan Pelaksanaan, Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Teknologi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Thomas R Dye dengan lima dimensi yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksana, peraturan pelaksana, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

#### **3.1. Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana ini dimaksud yaitu pengelolaan organisasi secara keseluruhan dan pembagian – pembagian tugas untuk keberlangsungan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi ini dianggap penting karena dalam penerapan kebijakan sangat bergantung pada pembagian tugas dan tanggung jawab.

#### **3.2. Anggaran Pelaksana**

Anggaran dana yang tidak sedikit. Keberhasilan mencapai tujuan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh anggaran yang digunakan. Pendapatan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melalui dana APBD. Belanja anggaran digunakan untuk biaya operasional seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan banjir. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda mendapatkan anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 0,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 10.277.734.800,-.

#### **3.3. Peraturan Pelaksana**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur kegiatan yang dijadikan standar dalam rangka proses mencapai tujuan. Menjadikan SOP sebagai pedoman akan membantu proses implementasi kebijakan menjadi lebih efisien dan efektif karena sebelumnya telah dipertimbangkan. Sehubungan dengan pembuatan SOP. Pelaksanaan Prosedur yang sesuai dengan standar sangat berpengaruh dengan keberhasilan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah hal ini dapat dilihat dari data yang peneliti peroleh menurut Kajian Resiko Bencana kota Samarinda yang sudah dipertimbangkan untuk setiap bencana pada level terendah pemerintahan dalam lingkup kajiannya.

#### **3.4. Sumber Daya Manusia**

Penyelenggaraan sumber daya manusia yang memiliki dampak positif bagi pemerintah atau pihak pelaksana serta masyarakat yang turut merasakan manfaat dalam penambahan tugas baru dalam pelayanan membaik. Indikator yang dipedomani dalam pelaksanaan penilaian indeks kepuasan

masyarakat yaitu dalam segi pelayanan pada saat pra bencana maupun pasca bencana. Hal ini dapat mengukur bagaimana kinerja dari pihak BPBD Kota Samarinda dalam penerapan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bencana yang ada.

### **3.5. Sumber Daya Teknologi**

Sebuah teknologi sangat diperlukan untuk mempermudah segala sesuatunya tidak terkecuali implementasi kebijakan. Teknologi hanya bisa bekerja dengan baik apabila infrastruktur yang digunakan juga memadai dan memenuhi standar sesuai kebutuhan. Berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda. Dari wawancara yang peneliti peroleh, dengan adanya alat pendeteksi banjir untuk menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan pemerintah Kota Samarinda mengadakan antisipasi penanganan banjir dengan diadakannya alat pendeteksi banjir, kolam retensi, dan penangkap lumpur.

### **3.6 Upaya yang Dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda diantaranya:

- a. Mengadakan sosialisasi tentang tanggap bencana
- b. Mengadakan pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat
- c. Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana
- d. Memaksimalkan kinerja Kelurahan Tangguh Bencana

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mengukur seberapa efektif Program yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda bagi keselarasan kehidupan utama bagi masyarakat Kota Samarinda yang tinggal di daerah rawan banjir. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan salah satunya yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pemahaman tanggap bencana, kurangnya kelurahan tangguh bencana dalam penanganan bencana, masyarakat belum memaksimalkan 3R dalam penerapan limbah rumah tangga dan belum tercukupinya anggaran untuk sarana prasarana dalam tanggap bencana. Upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda Provinsi

Kalimantan Timur salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan juga pelatihan kesiapsiagaan dapat memaksimalkan pengetahuan masyarakat dan efisiensi waktu dalam evakuasi serta meningkatkan kinerja kelurahan tangguh bencana untuk mendukung berlangsungnya implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir masih banyak ditemukan permasalahan. Hal itu menyebabkan kurang efektifnya BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah belum maksimal didapatkan oleh masyarakat. Permasalahan dalam penanggulangan yaitu sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menyebabkan penanggulangan bencana banjir belum berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dalam penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya penemuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang lebih luas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih ditujukan kepada kepala BPBD Kota Saamrinda beserta jajarannya, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas PUPR, Camat Sungai Pinang, dan Lurah Mugirejo yang memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan



Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).  
<https://doi.org/10.34010/Agregasi.V8i1.3060>

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition* (Ashley Dodge (Ed.); Fifteenth). Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data.

Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61.  
<https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V11i1.2235>

Suharto, S., & Setiawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Bpbd Kota Semarang Tahun 2020). *Spektrum*, 19(2), 2009–2016.  
<https://doi.org/10.31942/Spektrum.V19i2.6656>

Wurin, K. M., & Wardhono, H. (2022). *Evaluasi Implementasi Penanganan Bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Ileboleng Nusa Tenggara Timur*. 1(3), 535–566.

Zikri, Putri Eka Lidia & Alhadi. (2022). *Evaluasi Peran Pemerintah Nagari Aia Gadang Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Banjir* Lidia Eka Putri. 317–324.